

**PERSEPSI PEMUDA TERHADAP PARTAI POLITIK
NASIONAL PESERTA PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH
(Studi Pada KNPI Provinsi Banten)**

Agus Aan Hermawan
Universitas Mas'Laul Anwar
Email : agus.aan.h@gmail.com

ABSTRACT

The perception of young man to political party of participant of general election 2014 that political party had not committed function of political party well as according to its function. The function of the politics party which was not either done that was political communicative function, the function of political socialization or political education, the function of political rekrutmen, and function of conflict regulator. party mod system which multi party was considered that there were still too much the numbers. Vision and political party mission considered were not consistent with reality programme its activity. The quality of political cadre and party achievement seen that there were still minim in pushing refinement of public life. perception of implication Young man to political resilience of region in Banten affected at legitimasi decline government, Government policy was not supported by young man, and political participation of low young man. The increasing of young man opinion at un-believe at law enforcement officer, political system of democracy was seen could not yet push political stability which either due then could be done procedurally did not touch substance of value of democracy. The condition with implication to menaced at political resilience in the region of Banten's province

Keywords: *Perceptions of Youth, Political Parties, Political Resilience of Region.*

ABSTRAK

Persepsi pemuda terhadap partai politik peserta pemilu 2014 bahwa partai politik belum melakukan fungsi partai politik dengan baik sesuai fungsinya. Fungsi partai politik tersebut yang belum baik dilakukan yaitu fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi pengatur konflik. sistem kepartaian yang multi partai dianggap masih terlalu banyak jumlahnya. Visi dan misi partai politik dianggap belum konsisten dengan realitas program kegiatannya. Kualitas kader dan prestasi partai politik dipandang masih minim dalam mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Implikasi persepsi pemuda terhadap ketahanan politik wilayah di Banten berdampak pada legitimasi pemerintah yang menurun, kebijakan pemerintah yang tidak didukung pemuda, dan partisipasi politik pemuda rendah. Meningkatnya pandangan pemuda pada ketidakpercayaan pada penegak hukum, sistem politik demokrasi dipandang belum bisa mendorong stabilitas politik yang baik karena baru bisa dilakukan secara prosedural belum menyentuh substansi dari nilai demokrasi. Kondisi tersebut berimplikasi mengancam pada ketahanan politik di wilayah Provinsi Banten.

Kata Kunci: *Persepsi Pemuda, Partai Politik, Ketahanan Politik Wilayah.*

PENGANTAR

Demokrasi dalam sistem politik Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi pilihan sistem politik moderen, yang tentunya memberikan harapan besar bisa membawa masyarakatnya lebih sejahtera. Ruang kehidupan partai politik telah terbuka sejak masa Orde Lama dengan memberikan ruang kehidupan multi partai. Kemudian terjadinya pembatasan kehidupan kepartaian di masa Demokrasi Terpimpin pada masa Orde Baru yang ditandai dengan pengerdilan ruang gerak partai. Kemudian pada masa Reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini sebenarnya telah memberikan ruang kepada kehidupan partai politik untuk melakukan penataan lebih baik. Ruang penataan tersebut dengan dikeluarkannya UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 dan perubahan atas UU No 31 Tahun 2002. Namun, upaya tersebut selama masa reformasi berlangsung hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas partai politik di Indonesia. Usaha partai politik untuk terus melakukan perubahan lebih baik masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Terbukti permasalahan partai politik saat ini terjebak dalam kepragmatisan yang mengancam kehidupan perpolitikan dan dunia partai politik itu sendiri. Kepragmatisan partai politik membuat prinsip serba instan dan tanpa pembekalan kepada kadernya yang semuanya akhirnya menjadi karbitan. Permasalahan partai politik saat ini sangatlah kompleks, beberapa di antaranya sistem kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan baik. Banyak partai politik untuk bersaing dengan partai lainnya hanya dengan main *comot* (ambil) saja dan tidak dengan proses kaderisasi partai yang benar. Pertimbangannya yang penting si calon kadernya memiliki popularitas tinggi, pada akhirnya berimbas pada

citra partai politik memburuk di mata publik. Menurut Firmanzah, dalam bukunya “Mengelola Partai Politik” (2008: 34-33), saat ini sangat sulit untuk menemukan kaderisasi yang terpadu dan terencana dalam dunia politik. Partai politik peserta pemilu 2014 yang sudah ditetapkan KPU berjumlah lima belas partai politik, tiga di antaranya partai politik lokal di Aceh. Dua belas partai politik nasional yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya, (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai politik merupakan pilar kehidupan dalam berdemokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Namun, fungsi partai politik banyak mengalami penyimpangan (*deviation*).

Kondisi di atas merupakan ancaman dan gangguan terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Pemuda merupakan bagian dari lapisan masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari *stakeholders* pemerintahan yang mendukung demokrasi pada sistem politik. Alasan yang diambil, karena basis pemilih (*voters*) yang ada di Indonesia didominasi jumlahnya oleh pemilih pemula atau pemuda. Kemudian, potensi pengembangan partai politik menuntut untuk mengakomodir sumber daya manusia dari kalangan pemuda. Pemuda dianggap masih putih bersih atau idealis. Sifat-

sifat yang melekat pada kalangan pemuda biasanya kritis, idealis, independen, anti status-quo, properubahan, dan lebih rasional, sehingga posisi pemuda sangat strategis dan penting untuk dilibatkan dalam pembangunan politik demi terwujudnya ketahanan politik. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini mengambil judul “Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten)”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi pemuda terhadap partai politik nasional peserta pemilu 2014
2. Untuk mengkaji dampak persepsi pemuda terhadap partai politik peserta pemilu 2014 pada ketahanan wilayah di Provinsi Banten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di wilayah Provinsi Banten dengan lokus penelitian pada anggota organisasi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi Banten. Pengambilan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data dilakukan tidak hanya setelah pengumpulan data, melainkan juga pada waktu proses pengumpulan data. Setiap aspek pengumpulan data, peneliti senantiasa sekaligus melakukan

PEMBAHASAN

Partai Politik

Secara umum partai politik dapat dikatakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan

kelompok tersebut ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 menjelaskan “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sigmund Neuman mengartikan partai politik adalah “organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda” (Budiardjo, 1998: 16). Dengan demikian partai politik merupakan suatu perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Max Weber mendefinisikan, “partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut”. Partai politik menurut Max Waber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legitimasi legal-rasional. Kemudian, Ranney dan Kendal “partai

politik adalah sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik (Firmanzah, 2008: 67-69).

Ramlan Surbakti dalam bukunya "Memahami Ilmu Politik" menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang disusunnya (Surbakti, 2010:148).

Sebagai lembaga yang bertujuan meraih dan mempertahankan kekuasaan, partai politik memiliki beberapa fungsi. Menurut Sukarna menjelaskan terdapat tiga belas fungsi partai politik yaitu; pendidikan politik, sosialisasi politik, pemilihan/pemilihan pimpinan politik, pemanduan pemikiran politik, melakukan tata hubungan politik, mengkritik rezim yang memerintah, membina opini masyarakat, mengusulkan calon, bertanggungjawab atas pemerintahan, menyelesaikan perselisihan, mempersatukan pemerintahan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, dan memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat (Izra, 2011;23)

Miriam Budiardjo (2008;163-165) berpendapat bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Partai politik memiliki tujuan dan fungsi seperti yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui UU No,

2 Tahun 2011. Tujuan umum partai politik yaitu, pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (UU No. 2, 2011).

Tujuan khusus partai politik adalah, pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Franz-Magnis Suseno ada lima ciri hakiki negara demokratis, yaitu negara hukum, pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Magnis menegaskan bahwa suatu negara hukum tidak mesti demokratis. Pemerintahan monarkis atau paternalistikpun dapat taat kepada hukum. Demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya (Nurtjahjo, 2006;74).

Negara demokrasi merupakan negara yang memberikan keleluasaan warga negaranya untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam proses politik. Politik moderen menganggap partisipasi politik merupakan suatu yang penting

dalam membangun sistem politik yang sehat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 1998;1-2).

Herbet McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemebentukan kebijakan umum. Norman H. Nie dan Sidney mengatakan, “partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau sebaliknya (Budiardjo, 1998:2-3).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian, kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah yang menilai pemerintah bisa dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Tinggirendahnya kedua faktor tersebut,

Paigie membagi partisipasi menjadi empat tipe: Pertama, partisipasi politik aktif, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah oleh seseorang tinggi. Kedua, partisipasi cenderung pasif-tertekan (apatis), yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah. Ketiga, partisipasi militan-radikal, yaitu partisipasi ini kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan keempat, partisipasi tidak aktif (pasif), apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi (Surbakti, 2010;184-185).

Ketahanan Politik Wilayah

Ketahanan politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sunardi,1997). Ketahanan politik dibutuhkan agar mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Pasaunya, ketahanan politik berkaitan erat dengan kepemimpinan nasional dan sistem demokrasi suatu bangsa. Kualitas elite politik yang memadai dan pelaksanaan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil dinilai mampu meminimalisir munculnya gerakan *separatism*. Menurut Subagiyo, dkk, (Fatkhan, 2013:17) ketahanan dalam politik akan terwujud jika adanya indikator-indikator sebagai berikut: Pertama, Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat dan didukung oleh rakyatnya karena diangkat melalui pemilihan yang demokratis. Kedua,

Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, artinya segala bentuk penolakan dari masyarakat sangat kecil. Ketiga, Masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan partisipasi politik. Keempat Penegakkan supremasi hukum sebagai pengendali bagi pengajuan tuntutan, proses konversi tuntutan bagi kebijakan pemerintah.

Partai politik tidak bisa dihindarkan dari kehidupan negara yang demokratis. Semakin demokratis suatu bangsa semakin besar partisipasi politik dan keterlibatan publik. Masyarakat memiliki banyak pilihan institusi untuk memperjuangkan keinginan sosialnya. Pada situasi seperti ini, partai politik berkepentingan menjaring dukungan seluas-luasnya untuk memperkuat posisi dan peranannya. Namun, masyarakat memiliki otoritas penuh untuk memilih salah satu di antara partai politik yang terbaik menurutnya. Dengan demikian semakin baik kualitas partai politik maka kepercayaan masyarakat semakin besar terhadap institusi tersebut. Namun, dikhawatirkan adalah buruknya partai politik akan semakin apatisnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Kondisi tersebut akan memperlemah ketahanan politik, karena akan rentan dengan terjadinya konflik dan ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan pemimpin negara baik di daerah maupun di nasional.

Persepsi Pemuda Terhadap Parpol Peserta Pemilu 2014

Persepsi pemuda dalam tulisan ini perlu dikatakan terbatas hanya dari pandangan anggota KNPI Provinsi Banten. Pandangan persepsi pemuda dari yang sudah dikategorikan

peneliti yang tergabung dalam organisasi KNPI Banten terdiri dari dua kelompok organisasi kepemudaan (OKp). Dalam hal ini baik OKp berhaluan gerakan nasionalis maupun OKp yang berhaluan religius. Terdapat perbedaan dimana masing-masing kelompok memiliki pandangan adanya pembelaan kepada partai politik yang berhaluan ideologi nasionalis oleh OKp nasionalis, dan begitu pula dengan OKp religius adanya pembelaan pada partai politik yang berhaluan ideologi religius. Akan tetapi kedua kelompok berpandangan sama yang memandang Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dipandang buruk dalam pengelolaan dan citranya di hadapan pemuda.

Pemuda lebih banyak melihat permasalahan partai politik dari pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak berjalan dengan baik. Rusaknya citra partai politik pada ranah manajemen partai yang buruk, diantaranya rekrutmen calon kader tidak selektif, rekrutmen calon pejabat publik yang diusung oleh partai politik banyak bersifat transaksional pragmatis artinya hanya mengedepankan keuntungan segelintir orang dan kelompok tanpa memperdulikan masyarakat. Imbasnya kader partai yang menjadi pejabat publik tidak menjalankan jabatannya dengan amanah. Kemudian fenomena yang muncul yaitu maraknya pejabat publik terjerumus kasus pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran etika. Pengetahuan pemuda terhadap partai politik peserta pemilu 2014, secara umum belum merata diketahui secara mendalam oleh pemuda. Persepsi pemuda terhadap multi partai dipandang terlalu banyak dan perlu dibatasinya jumlahnya 3 sampai dengan 5 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu.

Hal tersebut karena dipandang tidak efisien dan efektif dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, konsistensi partai politik dalam merealisasikan visi, misi dan programnya belum sepenuhnya konsisten. Fungsi partai politik yang dinilai pemuda belum dilakukan dengan baik, yakni fungsi komunikasi politik yang masih berjalan satu arah, dimana aspirasi masyarakat masih tidak terakomodir. Fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik masih memberikan edukasi yang buruk seperti politik uang dan tidak jujur dalam berpolitik yang melanggar etika-etika politik. Fungsi rekrutmen politik belum menghasilkan kader partai politik yang profesional, rekrutmen pejabat politik dan rekrutmen kader masih belum terbuka yang dilakukan sebagian besar partai politik. Pola penjangkaran pejabat publik oleh partai politik masih dipandang pragmatis, kapital dan kedekatan masih menjadi pilihan keputusan. Persepsi terhadap fungsi sarana pengatur konflik, partai politik belum bisa mengendalikan dan mengelola konflik baik di internal partai politiknya sendiri maupun konflik di luar yaitu konflik di tengah masyarakat.

Pemuda masih memandang buruk kinerja partai politik, karena prestasinya belum banyak merubah kehidupan masyarakat lebih baik. Persepsi pada kepercayaan pejabat politik cukup rendah akibat perilaku politik yang menyimpang, sehingga pandangan pemuda atas masa depan partai politik dipandang pesimis oleh pemuda untuk berubah lebih baik.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah

Persepsi pemuda berimplikasi pada melemahnya legitimasi kekuasaan

pemerintahan, dimana kepercayaan pada pejabat publik yang diusung partai politik cukup rendah karena banyak oknum pejabat publik atau politisi yang melakukan tindakan KKN. Akibat dari lemahnya kepercayaan tersebut telah terjadi pergolakan perlawanan dari para pemuda untuk mengusut beberapa kasus korupsi yang salah satu dicontohkannya adalah pelanggaran korupsi penyusunan sengketa pilkada Kabupaten Lebak oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pejabat publik dari kader partai yang tersangkut korupsi membuat pemuda dalam penelitian ini dari perspektif KNPI Banten membuat sebagian besar geram dengan fenomena tersebut. Kondisi tersebut mengancam pada rendahnya partisipasi politik, misalnya dalam partisipasi pemilihan umum bahwa golput menjadi *trend* dari pemilih sebagai bentuk kekecewaan dan perlawanan pada sistem politik dan politisi yang buruk. Potensi ancaman dari persepsi pemuda juga berimplikasi pada partisipasi pembuatan kebijakan yang dibuat pemerintahan daerah banyak ditentang baik melalui media masa maupun dengan aksi demonstrasi di jalanan menuntut kebijakan yang adil berpihak pada masyarakat. Selain itu pelayanan publik sebagai produk dari kebijakan yang dibuat juga dirasakan masih rendah, hal tersebut banyak dikecam dan dikeluhkan pemuda menjadi alasan untuk melawan penguasa yang menjalankan roda pemerintahan.

Persepsi pemuda juga berimplikasi pada melemahnya kepercayaan pada penegak hukum. Perlawanan pun dilakukan dengan cara melakukan aksi demonstrasi pada perkara kasus hukum yang dipandang tidak

adil. Sistem demokrasi yang saat ini berjalan khususnya yang berlangsung di wilayah Provinsi Banten dipandang pemuda belum membuahkan hasil yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem politik tersebut, karena demokrasi berjalan selama ini belum sesuai dengan nilai-nilai bangsa, baru berjalan secara prosedural belum menyentuh substansial.

Permasalahan yang dianggap peneliti paling fundamental yaitu akibat tingginya ketidakpercayaan pada partai politik sebagai lembaga yang memproduksi kader pemimpin dan calon pejabat publik negara, tidak melakukan manajemen partai dengan baik. Belum tepatnya pola rekrutmen kader sebagai penyaring dari bahan baku yang akan menghasilkan produk berkualitas dan tidak ada pembinaan kader yang berkesinambungan dari partai membuat kualitas kadernya buruk. Akibatnya perilaku KKN dan pelanggaran hukum lainnya merajalela terjadi dalam tubuh partai politik dan pemerintahan. Pada akhirnya potensi dan riak perlawanan pada pemerintah terjadi di kalangan generasi penerus bangsa yaitu para pemuda, sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang dianggap oleh para pemuda, sehingga keadaan tersebut menimbulkan kegaduhan pada stabilitas politik. Hal tersebut menjadi ancaman sebab berpotensi merusak ketahanan politik wilayah khususnya di Provinsi Banten. Selain itu berpotensi mengancam keutuhan wilayah yang dapat merusak integrasi politik di wilayah Provinsi Banten. Harus dikatakan bahwa jika anggota organisasi KNPI Banten sebagai representatif dari organisasi kepemudaan di wilayah Provinsi Banten memandang buruk partai politik dan lemahnya kepercayaan pada

pejabat pemerintahan yang berasal dari kader partai politik, maka kondisi tersebut menjadi potensi ancaman yang besar bagi ketahanan politik wilayah. Ini dikarenakan anggota KNPI merupakan representatif pemuda di Banten yang memiliki kecerdasan politik dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk bisa mempengaruhi kaum muda di lingkungannya, sehingga potensi ancaman sudah pada tahap kritis untuk segera diatasi oleh pihak-pihak terkait khususnya pemerintah untuk bisa mengatasi secara preventif gejala ancaman tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini merangkum dua kesimpulan yaitu:

Pertama, persepsi pemuda terhadap partai politik peserta pemilu 2014 ditemukan cukup buruk penilaiannya. Penilaian tersebut terhadap fungsi partai politik baik pada fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik atau pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik dan fungsi pengatur konflik dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu penilaian buruk terhadap kinerja partai politik baik dari prestasi organisasinya sebagai lembaga maupun sebagai individu kadernya.

Kedua, persepsi pemuda terhadap ketahanan politik wilayah di Banten berimplikasi pada lemahnya legitimasi kekuasaan pemerintahan di Banten, baik pada pelayanan publik, kebijakan publik banyak ditentang dan dilakukan perlawanan oleh pemuda, penegakan supermasi hukum yang lemah, sistem demokrasi dipandang menimbulkan kebablasan tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Implikasi persepsi pemuda pada stabilitas politik berpotensi mengancam

ketahanan politik wilayah di Provinsi Banten dan berpotensi mengancam keutuhan wilayah yang merusak integrasi politik di wilayah Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 1998 *Partisipasi Politik dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik; edisi revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fathkan, Sulis Marwiyani. 2013. Dampak Pelaksanaan Pilkada Langsung Terhadap Ketahanan Politik Wilayah; Studi Kasus Pilkada Kota Depok Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat, *Tesis*: Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.

Firmanzah. 2008, *Mengelola Partai politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Izra, Donia. 2011. *Partai Politik Berguguran*. Yogyakarta: LKIS

Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sunardi, 1997, *Teori Ketahanan Nasional* Jakarta: Penerbit Hastanas

Surbakti, Ramelan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasara.

Undang-Undang:

UU No 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*.